

**Request for Proposals Title:** Pengembangan Dan Implementasi Sistem Monitoring Hutan Berbasis SMART di Ekosistem Hutan Batang Toru

**RFP No:** 015/V/18/2026

**Date of Issuance:** 18 Mei 2026

## **1. LATAR BELAKANG**

Sebagai salah satu wilayah yang menjadi pusat keanekaragaman hayati di Pulau Sumatra, Ekosistem Batang Toru (EBT) memiliki nilai ilmiah yang tinggi dan keanekaragaman hayati yang penting untuk dilindungi. Sebagian besar wilayah EBT masuk dalam kategori Kawasan Keanekaragaman Hayati Kunci/Penting (Key Biodiversity Area), yang merupakan salah satu tempat terpenting di dunia dalam perlindungan dan pelestarian spesies beserta habitatnya. Bagi orang utan tapanuli (*Pongo tapanuliensis*) yang dinyatakan sebagai spesies baru pada tahun 2017 (Nater et al., 2017) dan berstatus konservasi Kritis (Critically Endangered). Menurut IUCN, EBT merupakan satu-satunya tempat tinggal dengan jumlah estimasi populasi ~800 individu (Sloan et al., 2018). Sebaran Orang Utan Tapanuli telah terfragmentasi akibat aktivitas manusia, termasuk oleh jalan lintas Sumatra dan Sungai Batang Toru yang menjadi penghalang utama pergerakan orang utan. Habitat orang utan tapanuli telah terisolasi ke dalam tiga blok di EBT, yaitu Blok Barat, Blok Barat (Selatan), dan Blok Timur. Fragmentasi ini diperparah oleh degradasi hutan dataran rendah, sehingga habitat yang tersisa sebagian besar berada di ketinggian >600 mdpl (Kuswanda, 2014; Working Group of Batang Toru Landscape Management, 2019). Kondisi ini dapat meningkatkan risiko in-breeding, perburuan, dan konflik dengan manusia, yang mempercepat penurunan populasi secara drastis (Meijaard et al., 2021).

Untuk itu maka perlu dilakukan pengamanan terhadap ekosistem hutan Batang Toru melalui Patroli Pengamanan Hutan berbasis SMART. Sistem ini haruslah terintegrasi dan dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan melalui setiap Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), mitra pembangunan serta masyarakat dalam hal ini Masyarakat Mitra POLHUT (MMP) yang wilayah kerjanya berada pada ekosistem ini.

Pengembangan sistem patroli berbasis SMART menjadi hal pertama dan krusial yang harus disiapkan sehingga dalam setiap patroli yang akan dilakukan mempunyai suatu sistem database pencatatan dan pencapaian patroli yang terdata yang kedepannya dapat dipergunakan sebagai arahan untuk menentukan strategi perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan Batang Toru. Pengembangan sistem patroli ini diharapkan akan terintegrasi dengan sistem SMART BBKSDA Sumatra Utara. Sehingga data yang diperoleh dari setiap patroli akan dikumpulkan di setiap resort dan didistribusikan berjenjang hingga sampai di pengelola data utama di Dinas LHKP Sumatra Utara dan kemudian diintegrasikan dengan data di BBKSDA Sumatra Utara.

Untuk pengembangannya maka diperlukan dukungan konsultan/tenaga ahli untuk merencanakan pengembangan sistem patroli berbasis SMART berikut dengan menyiapkan sistem SMART yang disesuaikan untuk kebutuhan DLHKP Sumatra dan UPT Teknisnya.

## 2. Gambaran Umum Proyek

- Penyusunan Inception Report & Stakeholder Mapping
- Pelaksanaan Kajian Awal dan Standar Data Patroli Berbasis SMART
- Pengembangan Mekanisme Integrasi, Tata Kelola, Kerangka Operasional dan SOP Patroli Berbasis SMART
- Kerangka Monitoring Evaluasi dan Rencana Implementasi Sistem Patroli Berbasis SMART di Ekosistem Batang Toru

## 3. Kerangka Acuan, Hasil yang Diharapkan, dan Jadwal Hasil yang Diharapkan (Lihat Lampiran 2)

### 4. Rincian Pengajuan

- Batas akhir.** Proposal harus diterima paling lambat tanggal **5 Juni 2026 pukul 17:00 WIB**. Keterlambatan pengajuan tidak akan diterima. Proposal harus diajukan melalui e-mail [procurementKI@konservasi-id.org](mailto:procurementKI@konservasi-id.org); Semua proposal harus diajukan sesuai dengan panduan yang tercantum dalam RFP ini.
- Masa berlaku penawaran.** 120 hari sejak batas akhir pemasukan penawaran.
- Klarifikasi.** Pertanyaan dapat disampaikan ke [procurementKI@konservasi-id.org](mailto:procurementKI@konservasi-id.org) paling lambat pada tanggal dan waktu yang ditentukan dalam jadwal di bawah ini. Subjek e-mail harus memuat nomor RfP dan judul RfP. KI akan menanggapi secara tertulis klarifikasi yang disampaikan paling lambat pada tanggal yang ditentukan dalam jadwal di bawah ini. Tanggapan terhadap pertanyaan yang mungkin menjadi kepentingan bersama semua penawar akan di-posting ke situs web KI dan/atau dikomunikasikan melalui e-mail.
- Perubahan.** Setiap saat sebelum batas akhir penyampaian proposal, KI dapat, dengan alasan apapun, mengubah dokumen RfP melalui perubahan yang akan di-posting di situs web KI dan/atau dikomunikasikan melalui e-mail.

### 5. Persyaratan Minimum

Penerima Hibah dapat berupa institusi, lembaga, atau tim dengan satu ketua/koordinator tim dan anggota tim. Penerima Hibah akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diselesaikan dan yang dihasilkan.

1. Lembaga/Perusahaan atau Tim Ahli Independen yang terdiri dari sekumpulan individu dengan spesialisasi yang relevan.
2. Mempunyai pengalaman bekerja di lanskap Batang Toru.
3. Pengalaman Konservasi & Kebijakan: Minimal 5–7 tahun pengalaman kerja kolektif dalam manajemen kawasan, kebijakan kehutanan, atau konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.

4. Spesialisasi SMART Patrol: Memiliki rekam jejak yang terbukti dalam merancang, mengonfigurasi, dan mengimplementasikan sistem Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART), baik di tingkat tapak maupun manajerial.
5. Kemampuan Fasilitasi Multipihak: Memiliki pengalaman dalam memfasilitasi forum koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Pemerintah/DLHK, KPH, NGO, dan sektor swasta) untuk mencapai konsensus teknis maupun legal.
6. Keahlian Manajemen Data & GIS: Menguasai pengelolaan basis data spasial, kustomisasi data model SMART (.xml), dan analisis tren spasial menggunakan perangkat lunak GIS.
7. Pengembangan Dashboard & Visualisasi Data: Memiliki kemampuan teknis untuk membangun dashboard informasi yang interaktif dan user-friendly untuk mendukung pengambilan keputusan.
8. Penyusunan Dokumen Standar Operasional: Berpengalaman dalam menyusun dokumen teknis, paket SOP (Standard Operating Procedures), dan panduan kerja yang aplikatif di lapangan serta sesuai dengan regulasi pemerintah.
9. Kapasitas Pelatihan & Transfer Teknologi: Memiliki metodologi yang efektif dalam melakukan pelatihan teknis dan pendampingan lapangan kepada personil dengan tingkat kapasitas yang beragam.
10. Pemahaman Regulasi: Memahami secara mendalam kerangka hukum kehutanan terbaru, termasuk panduan patroli SMART sesuai standar Memorandum Dirjen KSDAE No. M 46/2025.

**Kriteria evaluasi:**

Perencanaan teknis, meliputi pendekatan, metodologi, rencana kerja, dan timeline (50%).  
Portofolio dan kualifikasi personel kunci (25%) dan usulan anggaran (25%).

**6. Dokumen Proposal yang Harus Disertakan**

- a. Halaman sampul yang ditandatangani pada kop surat penawar dengan informasi kontak penawar.
- b. Pernyataan yang ditandatangani tentang Transparansi, Integritas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Lampiran 1).
- c. Proposal Teknis.
  - i. Kemampuan Perusahaan, Pengalaman, Kinerja Masa Lalu, dan 3 referensi klien. Harap sertakan deskripsi proyek atau tugas serupa dan setidaknya tiga referensi klien.
  - ii. Kualifikasi Personel Utama. Harap lampirkan CV yang menunjukkan bagaimana tim yang diusulkan memenuhi persyaratan minimum yang tercantum di Bagian 5 (Persyaratan Minimum).
  - iii. Pendekatan Teknis, Metodologi, dan Rencana Kerja Terperinci. Proposal Teknis harus menjelaskan secara rinci bagaimana penawar bermaksud untuk melaksanakan persyaratan yang dijelaskan dalam Kerangka Acuan (Lihat Bagian 3 atau Lampiran 2).
- d. Proposal Biaya. Penawar harus menggunakan format proposal biaya (Lampiran 3).

## 7. Kriteria Evaluasi

Dalam mengevaluasi proposal, KI akan mencari value for money dengan mempertimbangkan manfaat proposal teknis dan biaya. Proposal akan dievaluasi menggunakan kriteria berikut:

<b>Kriteria Evaluasi</b>	<b>Skor (dari 100)</b>
Metodologi, kerangka kerja dan rencana kerja yang diusulkan sesuai dengan tugas dan pelaksanaan pekerjaan yang diharapkan	15%
Paparan presentasi jelas, systematis secara kegiatan, logis dalam perencanaan, realistis, efektif dan efisien	20%
Kinerja dan pengalaman pada pekerjaan sebelumnya memenuhi kualifikasi syarat minimum	25%
Tim dan personel memiliki kapasitas dan keahlian teknis khusus untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan	20%
Biaya yang diusulkan realistis dan wajar, serta menggambarkan pemahaman yang kuat dalam pemenuhan tugas	20%

## 8. Lini Masa Proposal

Panggilan Permintaan Proposal/RfP	18 Mei 2026
Klarifikasi disampaikan ke KI	22 Mei 2026
Klarifikasi diberikan kepada penawar yang diketahui	27 Mei 2026
Tenggat waktu penyampaian proposal ke KI	5 Juni 2026
Seleksi akhir	15 Juni 2026

9. **Hasil Seleksi.** Perjanjian antara KI dengan penawar terpilih selambat-lambatnya akan diluncurkan tanggal **22 Juni 2026**. Setiap perjanjian yang dibuat akan mengikuti syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Layanan KI. Model perjanjian dapat diberikan berdasarkan permintaan. Dokumen RFP ini tidak mengikat KI untuk menandatangani kontrak maupun menanggung biaya yang timbul dalam penyusunan atau pengajuan proposal. Selain itu, KI berhak untuk menolak sebagian atau seluruh penawaran jika dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaik KI. Pemilihan proposal yang diterima akan sepenuhnya menjadi Keputusan KI, dan KI tidak berkewajiban untuk mengungkapkan hasil evaluasi kepada peserta secara individu.

10. **Kerahasiaan.** Semua informasi hak milik yang diberikan oleh penawar akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan dibagikan kepada pelamar potensial maupun aktual selama proses pengadaan berlangsung. Informasi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, penawaran harga, proposal biaya, dan proposal teknis. KI dapat, tetapi tidak berkewajiban, untuk mempublikasikan hasil pengadaan di situs web resmi setelah proses selesai selesai dan kontrak telah diberikan. Hasil evaluasi KI bersifat rahasia, dan skor pelamar tidak akan dibagikan kepada peserta lelang lainnya.
11. **Kode Etik.** Semua penawar diharapkan untuk melaksanakan standar perilaku tertinggi dalam mempersiapkan, menyerahkan, dan jika dipilih, pada akhirnya, melaksanakan pekerjaan yang ditentukan sesuai dengan Kode Etik KI. Reputasi KI berawal dari komitmen kami terhadap nilai-nilai kami: Integritas, Rasa Hormat, Keberanian, Optimisme, Semangat, dan Kerja Sama Tim. Kode Etik KI (selanjutnya disebut “Kode”) memberikan panduan kepada karyawan, penyedia layanan, tenaga ahli, pekerja magang, dan relawan KI dalam menjalankan nilai-nilai inti KI, dan menguraikan standar minimum untuk perilaku etis yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Setiap pelanggaran Kode Etik, serta kekhawatiran mengenai integritas proses dan dokumen pengadaan harus dilaporkan kepada KI melalui Hotline Etik di [www.ci.ethicspoint.com](http://www.ci.ethicspoint.com).
12. **Lampiran:**
  - Lampiran 1: Representasi Transparansi, Integritas, Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial
  - Lampiran 2: Kerangka Acuan
  - Lampiran 3: Template Proposal Biaya

## **Lampiran 1: Representasi Transparansi, Integritas, Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial**

**RFP No. 015/V/12/2026**

UEI Number (if applicable):

All Offerors are expected to exercise the highest standards of conduct in preparing, submitting and if selected, eventually carrying out the specified work in accordance with KI's Code of Ethics. KI's Code of Ethics provides guidance to KI employees, service providers, experts, interns, and volunteers in living KI's core values, and outlines minimum standards for ethical conduct which all parties must adhere to. Any violations of the Code of Ethics should be reported to KI via its Ethics Hotline at [www.ci.ethicspoint.com](http://www.ci.ethicspoint.com).

KI relies on the personal integrity, good judgment and common sense of all third parties acting on behalf, or providing services to the organization, to deal with issues not expressly addressed by the Code or as noted below.

**I. With respect to KI's Code of Ethics, we certify:**

- a. We understand and accept that KI, its contractual partners, grantees and other parties with whom we work are expected to commit to the highest standards of Transparency, Fairness, and Integrity in procurement.

**II. With respect to social and environmental standards, we certify:**

- a. We are committed to high standards of ethics and integrity and compliance with all applicable laws across our operations, including prohibition of actions that facilitate trafficking in persons, child labor, forced labor, sexual abuse, exploitation or harassment. We respect internationally proclaimed human rights and take no action that contributes to the infringement of human rights. We protect those who are most vulnerable to infringements of their rights and the ecosystems that sustain them.
- b. We fully respect and enforce the environmental and social standards recognized by the international community, including the fundamental conventions of International Labour Organization (ILO) and international conventions for the protection of the environment, in line with the laws and regulations applicable to the country where the contract is to be performed.

**III. With respect to our eligibility and professional conduct, we certify:**

- a. We are not and none of our affiliates [members, employees, contractors, subcontractors, and consultants] are in a state of bankruptcy, liquidation, legal settlement, termination of activity, or guilty of grave professional misconduct as determined by a regulatory body responsible for licensing and/or regulating the offeror's business
- b. We have not and will not engage in criminal or fraudulent acts. By a final judgment, we were not convicted in the last five years for offenses such as fraud or corruption, money laundering or professional misconduct.

- c. We are/were not involved in writing or recommending the terms of reference for this solicitation document.
- d. We have not engaged in any collusion or price fixing with other offerors.
- e. We have not made promises, offers, or grants, directly or indirectly to any KI employees involved in this procurement, or to any government official in relation to the contract to be performed, with the intention of unduly influencing a decision or receiving an improper advantage.
- f. We have taken no action nor will we take any action to limit or restrict access of other companies, organizations or individuals to participate in the competitive bidding process launched by KI.
- g. We have fulfilled our obligations relating to the payment of social security contributions or taxes in accordance with the legal provisions of the country where the contract is to be performed.
- h. We have not provided, and will take all reasonable steps to ensure that we do not and will not knowingly provide, material support or resources to any individual or entity that commits, attempts to commit, advocates, facilitates, or participates in terrorist acts, or has committed, attempted to commit, facilitate, or participated in terrorist acts, and we are compliant with all applicable Counter-Terrorist Financing and Anti-Money Laundering laws (including USA Patriot Act and U.S. Executive Order 13224).
- i. We certify that neither we nor our directors, officers, key employees or beneficial owners are included in any list of financial or economic sanctions, debarment or suspension adopted by the United States, United Nations, the European Union, the World Bank, or General Services Administration's List of Parties Excluded from Federal Procurement or Non-procurement programs in accordance with E.O.s 12549 and 12689, "Debarment and Suspension". [Include additional sanctions lists of the country of a public donor, if required by the donor.]

Name: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

## **Lampiran 2: Kerangka Acuan Kerja**

### **PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING HUTAN BERBASIS SMART DI EKOSISTEM BATANG TORU**

#### **LATAR BELAKANG**

Sebagai salah satu wilayah yang menjadi pusat keanekaragaman hayati di Pulau Sumatra, Ekosistem Batang Toru (EBT) memiliki nilai ilmiah yang tinggi dan keanekaragaman hayati yang penting untuk dilindungi. Sebagian besar wilayah EBT masuk dalam kategori Kawasan Keanekaragaman Hayati Kunci/Penting (Key Biodiversity Area), yang merupakan salah satu tempat terpenting di dunia dalam perlindungan dan pelestarian spesies beserta habitatnya. Bagi orang utan tapanuli (*Pongo tapanuliensis*) yang dinyatakan sebagai spesies baru pada tahun 2017 (Nater et al., 2017) dan berstatus konservasi Kritis (Critically Endangered). Menurut IUCN, EBT merupakan satu-satunya tempat tinggal dengan jumlah estimasi populasi ~800 individu (Sloan et al., 2018). Sebaran Orang Utan Tapanuli telah terfragmentasi akibat aktivitas manusia, termasuk oleh jalan lintas Sumatra dan Sungai Batang Toru yang menjadi penghalang utama pergerakan orang utan. Habitat orang utan tapanuli telah terisolasi ke dalam tiga blok di EBT, yaitu Blok Barat, Blok Barat (Selatan), dan Blok Timur. Fragmentasi ini diperparah oleh degradasi hutan dataran rendah, sehingga habitat yang tersisa sebagian besar berada di ketinggian >600 mdpl (Kuswanda, 2014; Working Group of Batang Toru Landscape Management, 2019). Kondisi ini dapat meningkatkan risiko in-breeding, perburuan, dan konflik dengan manusia, yang mempercepat penurunan populasi secara drastis (Meijaard et al., 2021).

Untuk itu maka perlu dilakukan pengamanan terhadap ekosistem hutan Batang Toru melalui Patroli Pengamanan Hutan berbasis SMART. Sistem ini haruslah terintegrasi dan dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan melalui setiap Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), mitra pembangunan serta masyarakat dalam hal ini Masyarakat Mitra POLHUT (MMP) yang wilayah kerjanya berada pada ekosistem ini.

Pengembangan sistem patroli berbasis SMART menjadi hal pertama dan krusial yang harus disiapkan sehingga dalam setiap patroli yang akan dilakukan mempunyai suatu sistem database pencatatan dan pencapaian patroli yang terdata yang kedepannya dapat dipergunakan sebagai arahan untuk menentukan strategi perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan Batang Toru. Pengembangan sistem patroli ini diharapkan akan terintegrasi dengan sistem SMART BBKSDA Sumatra Utara. Sehingga data yang diperoleh dari setiap patroli akan dikumpulkan di setiap resort dan didistribusikan berjenjang hingga sampai di pengelola data utama di Dinas LHKP Sumatra Utara dan kemudian diintegrasikan dengan data di BBKSDA Sumatra Utara.

Untuk pengembangannya maka diperlukan dukungan konsultan/tenaga ahli untuk merencanakan pengembangan sistem patroli berbasis SMART berikut dengan menyiapkan sistem SMART yang disesuaikan untuk kebutuhan DLHKP Sumatra dan UPT Teknisnya.

## TUGAS & DELIVERABLE

Konsultan/Tenaga Ahli ini akan bekerja dengan perincian tugas dan deliverable sebagai berikut:

Tabel 1. Tugas dan Deliverable

No	Activities	Deliverable	Period of Deliverable	Presentase
1	<p><b>Penyusunan Inception Report</b> Dengan cakupan aktivitas di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kick-off meeting &amp; Penyusunan rencana kerja detail (workplan)</li> <li>2. Inventarisasi masukan untuk penyusunan SOP Bersama Patroli berbasis SMART</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pelaksanaan Kick-off meeting</li> <li>2. Tersedianya rencana kerja detail</li> <li>3. Tersedianya Inception Report</li> <li>4. Tersedianya masukan untuk SOP Bersama Patroli berbasis SMART</li> </ol>	15 July 2026	15%
2	<p><b>Penyelarasan Standar Data dan Sistem Patroli Berbasis SMART</b> Dengan cakupan aktivitas di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi GAP &amp; bottleneck integrasi sistem patroli berbasis SMART</li> <li>2. Review dan komparasi data antarpihak</li> <li>3. Penyusunan standar data model untuk EBT</li> <li>4. FGD validasi standar data</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya laporan analisis GAP dan Bottleneck Integrasi Sistem Patroli berbasis SMART serta strategi tindaklanjutnya</li> <li>2. Tersedianya data dan informasi penggunaan SMART dari berbagai pihak untuk penyusunan standar data model EBT</li> <li>3. Mendukung pelaksanaan FGD Validasi Standar Data dan SOP Bersama Patroli berbasis SMART</li> </ol>	15 Agustus 2026	25%
3	<p><b>Pengembangan Mekanisme Integrasi, Tata Kelola, Kerangka Operasional dan SOP Patroli Berbasis SMART,</b> Dengan cakupan aktivitas di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan alur data dan sistem integrasi</li> <li>2. Perancangan tata kelola dan alur operasional patroli berbasis SMART</li> <li>3. Penyusunan paket SOP patroli berbasis SMART (SOP perencanaan patroli, pelaksanaan patroli, pengelolaan data patroli, analisis &amp; pelaporan patroli, monitoring &amp; evaluasi, berbagi data patroli, koordinasi &amp; tata kelola)</li> <li>4. Pelaksanaan workshop dan sesi peningkatan kapasitas (standar data, integrasi, peran &amp; alur kerja)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Alur data dan Sistem Terintegrasi</li> <li>2. Tersedianya rancangan tata kelola dan alur operasional patroli berbasis SMART</li> <li>3. Finalisasi Paket SOP Patroli (Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan data, analisis data &amp; pelaporan hasil patroli, monitoring dan evaluasi patroli, berbagi data dan koordinasi patroli) dan Template Laporan Hasil Patroli</li> <li>4. Mendukung pelaksanaan Lokakarya/workshop peningkatan kapasitas</li> </ol>	30 September 2026	30%

4	<p><b>Pengembangan Dashboard Informasi Patroli Berbasis SMART di EBT</b>          Dengan cakupan aktivitas di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perancangan dashboard informasi, yang memuat di antaranya jenis indikator yang ditampilkan, struktur visualisasi (peta, grafik, tabel, dsb), frekuensi pembaruan data, dsb.</li> <li>2. Penyusunan rencana implementasi &amp; roadmap</li> <li>3. Penyusunan laporan akhir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dashboard informasi</li> <li>2. Tersedianya rencana implementasi &amp; roadmap Patroli berbasis SMART</li> <li>3. Rekomendasi Kebijakan untuk ditindaklanjuti</li> <li>4. Rencana tindak lanjut pengembangan Data Center</li> <li>5. Tersedianya laporan akhir konsultasi</li> </ol>	31 Oktober 2026	30%
<b>TOTAL</b>				100%

### ARAHAN TEKNIS

Kontak utama untuk pertanyaan terkait kontrak adalah Batang Toru Program Manager. Penerima Hibah akan menerima arahan teknis utama dari National Biodiversity Conservation Coordinator dan Sumatra Biodiversity Coordinator serta Tim Teknis KI lainnya jika diperlukan.

### TIMELINE

Penerima Hibah akan melaksanakan pekerjaannya dalam jangka waktu 4 bulan dari 1 July – 31 Oktober 2026.

### KUALIFIKASI & PENGALAMAN

Calon kandidat harus memenuhi persyaratan minimum berikut:

1. Lembaga/Perusahaan atau Tim Ahli Independen yang terdiri dari sekumpulan individu dengan spesialisasi yang relevan.
2. Mempunyai pengalaman bekerja di lanskap Batang Toru.
3. Pengalaman Konservasi & Kebijakan: Minimal 5–7 tahun pengalaman kerja kolektif dalam manajemen kawasan, kebijakan kehutanan, atau konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.
4. Spesialisasi SMART Patrol: Memiliki rekam jejak yang terbukti dalam merancang, mengonfigurasi, dan mengimplementasikan sistem Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART), baik di tingkat tapak maupun manajerial.
5. Kemampuan Fasilitasi Multipihak: Memiliki pengalaman dalam memfasilitasi forum koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Pemerintah/DLHK, KPH, NGO, dan sektor swasta) untuk mencapai konsensus teknis maupun legal.
6. Keahlian Manajemen Data & GIS: Menguasai pengelolaan basis data spasial, kustomisasi data model SMART (.xml), dan analisis tren spasial menggunakan perangkat lunak GIS.
7. Pengembangan Dashboard & Visualisasi Data: Memiliki kemampuan teknis untuk membangun dashboard informasi yang interaktif dan user-friendly untuk mendukung pengambilan keputusan.
8. Penyusunan Dokumen Standar Operasional: Berpengalaman dalam menyusun dokumen teknis, paket SOP (Standard Operating Procedures), dan panduan kerja yang aplikatif di lapangan serta sesuai dengan regulasi pemerintah.

9. Kapasitas Pelatihan & Transfer Teknologi: Memiliki metodologi yang efektif dalam melakukan pelatihan teknis dan pendampingan lapangan kepada personil dengan tingkat kapasitas yang beragam.
10. Pemahaman Regulasi: Memahami secara mendalam kerangka hukum kehutanan terbaru, termasuk panduan patroli SMART sesuai standar Memorandum Dirjen KSDAE No. M 46/2025.

#### **Kriteria evaluasi:**

Perencanaan teknis, meliputi pendekatan, metodologi, rencana kerja, dan timeline (50%).  
Portofolio dan kualifikasi personel kunci (25%) dan usulan anggaran (25%).

#### **PEMBAYARAN**

Penerima Hibah diharapkan untuk menyerahkan faktur dengan jumlah berdasarkan penyerahan yang jatuh tempo sebagaimana dirinci pada **Tabel 1** Tugas dan *Deliverable*. Lebih lanjut terkait pembayaran:

1. Pembayaran Biaya Layanan sesuai dengan tahapan yang disebutkan di atas.
2. Biaya Layanan akan dibayarkan setelah penyerahan dan persetujuan serta penerimaan KI atas luaran dan *invoice* terkait.
3. Semua pembayaran Biaya Layanan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Indonesia.
4. Jika ada yang perlu untuk diubah dari **Tabel 1**, maka harus berdasarkan persetujuan oleh konsultan dan KI sebelumnya secara tertulis.

#### **PENUTUP**

Terms of Reference ini merupakan petunjuk dan pedoman bagi pelaksanaan pekerjaan Pengembangan dan Implementasi Sistem Monitoring Hutan Berbasis SMART di Ekosistem Hutan Batang Toru.

Apabila ada beberapa petunjuk atau tahapan pekerjaan yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, Pelaksana pekerjaan dapat mengusulkan perubahan dan argumentasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.

Tim pelaksana pekerjaan selalu berkoordinasi dengan Tim Konservasi Indonesia dalam penyelesaian dan pelaksanaan pekerjaan, didukung oleh Tim Teknis KI. Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi perlu didiskusikan serta mendapat persetujuan dari pihak yang memberikan tugas.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan dan bila ada kekeliruan akan diadakan revisi kemudian.

### **Lampiran 3: Template Proposal Biaya**

The cost proposal must be all-inclusive of profit, fees, or taxes. Additional costs cannot be included after award, and revisions to proposed costs may not be made after submission unless expressly requested by CI should the offerors' proposal be accepted. Nevertheless, for the purpose of the proposal, Offerors must provide a detailed budget showing major expense line items. Offers must show unit prices, quantities, and total prices. All items, services, etc. must be clearly labeled and included in the total price offered. All cost information must be expressed in IDR.

If selected, Offeror shall use its best efforts to minimize the financing of any taxes on goods and services, or the importation, manufacture, procurement or supply thereof. If the Offeror is eligible to apply for refunds on taxes paid, the Offeror shall do so. Any tax savings should be reflected in the total cost.

#### Cost Breakdown by Deliverable

<b>Deliverable</b>	<b>Price (Lump Sum, All Inclusive)</b>
Insert deliverable 1 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 2 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 3 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 4 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 5 from Section 3 or attached TOR	

#### Cost Breakdown by Cost Component (example only)

<b>Description</b>	<b>Unit of measure (day, month etc)</b>	<b>Total period of engagement</b>	<b>Unit cost/rate</b>	<b>Total Cost for the Period</b>
Consultant 1				
Consultant 2				
Sub-total Personnel				
Travel Costs (if applicable)				
Other related Costs (please specify)				
<b>Total Cost of Financial Proposal</b>				